PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TAHUN 2016

(Studi di Desa Labuhan Baru, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)

(Skripsi)

Oleh

Panca Setiawati

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG

2017

ABSTRACT

PUBLIC PERSEPTIONS ABOUT THE EFFECTIVENESS OF *DANA DESA* MANAGEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF ROAD CONSTRUCTION YEAR 2016

(In Labuhan Baru Village, Way Serdang of Sub-districts, Mesuji)

By

Panca Setiawati

This study aims to examine and explain public perseptions about the effectiveness of *dana desa* management on the implementation of road construction in LabuhanBaru, Way Serdang Sub-districts, Mesuji. In addition, the purpose of this research is also to determine the amount of factors formed after the factor analysis has been done and the amount of contribution generated by the factors. This research method used two kinds of quantitative approachthat are descriptive and explanatory. The research respondents were 92 people which were determined by using purposive sampling technique. Data analysis was done by presenting the frequency distribution and factor analysis. The result shows that: (1). The according to assessment of the Public, management of *dana desa* is in a category of fairly effective at 99.5, (2). The result of factor analysis shows that from 27 indicators tested, 6 new factors were formed (accountable, discipline and orderly budget, transparency, evaluation, planning, and participation), and than (3). The highest contribution among the six factors is accountable factor with the eigenvalues of 9.035.

Keywords: *Dana desa*, Effectiveness, Development, Factor Analysis

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2016

(Studi di Desa Labuhan BARU, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)

Oleh

PANCA SETIAWATI

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menjelaskan persepsi masyarakat tentang efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan desa di Labuhan Baru, kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Selain itu, juga untuk mengetahui jumlah faktor yang terbentuk setelah dilakukan analisis faktor, dan besaran kontribusi yang dihasilkan oleh faktor. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan, dengan jenis deksriptif, dan eksplanatori. Responden penelitian sebanyak 92 orang, penentuan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan penyajian distribusi frekuensi dan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan: (1). Menurut penilaian masyarakat, pengelolaan dana desa berada pada kategori cukup efektif dengan angka 99,5, (2). Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa dari 27 indikator yang di uji terbentuk 6 faktor baru (akuntabel, disiplin dan tertib anggaran, transparansi, evaluasi, perencanaan, dan partisipasi), dan (3). Kontribusi tertinggi dari keenam faktor tersebut yakni akuntabel dengan angka *eigen values* sebesar 9,035.

Kata kunci: Dana Desa, Efektivitas, Pembangunan, Analisis Faktor

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TAHUN 2016

(Studi di Desa Labuhan baru, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)

Oleh

PANCA SETIAWATI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

Judul Skripsi	:	**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DI DESA LABUHAN BARU TAHUN 2016**
Nama Mahasiswa	:	*Panca Setiawati*
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**1316011057**
Jurusan	:	**Sosiologi**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim

NIP. 19850530 200812 1 002

2. Ketua Jurusan

Drs. Ikram, M.Si

NIP. 19610602 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim .....

Penguji Utama : Dr. Hartoyo, M.Si .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya

NIP. 19590806 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Agustus 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Pada karya tulis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis telah dicantumkan dengan jelas nama pengarang yang dijadikan acuan dalam naskah, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

Panca Setiawati

1316011057

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Panca Setiawati, yang lahir di Labuhan Baru pada tanggal 29 Oktober 1994. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudari, pasangan Bapak Ratijo dan Ibu Kusiyah. Penulis memiliki satu kakak perempuan dan satu adik perempuan.

Penulis beragama Islam, berkebangsaan Indonesia. Penulis tinggal bersama keluarganya di Desa Labuhan Baru, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Pada tahun 2007 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 01 Labuhan Baru. Pada tahun 2010 menyelesaikan pendidikan menengah di SMP MMT Labuhan Baru, dan pada tahun 2013 telah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 02 Menggala.

Tepat pada tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Jurusan Sosiologi. Pada bulan Januari 2016 silam, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Aji Permai Talang Buah, Kecamatan Gedung Aji Lama, Tulang Bawang. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) pada tahun 2017 dengan judul persepsi masyarakat tentang efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Labuhan Baru tahun anggaran 2016.

MOTTO

Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan,
melainkan oleh ketekunan
(Samuel Johnson)

Dzawuul khodhoba bissumti
(Imam Mutholib)

Pepohonan yang tumbuh menjadi hutan tidak akan pernah mencoba mengendalikan apapun. Bahkan rerumputan, angin, serangga, dan ilalang yang mencoba mengganggunya-pun akan dirangkulnya.
(Jung Yoon Jung)

Ketika kamu seorang penonton, jangan berlaku layaknya seorang juri ataupun komentator.
(Panca Setiawati)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan bagi orang-orang tersayang:

Kedua orangtuaku tersayang
Bapak Ratijo dan Ibu Kusiyah

Ayuk dan adikku tercinta
Septi Setia Negara dan Handri Setiyani

Tunanganku tersayang
Imam Mutholib

Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, motivasi, dan do'a yang tiada henti untukku.

Bapak Teuku Fahim, S.Sos., M.Krim
Terimakasih telah membimbingku dengan tulus ikhlas

Dan

Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemampuan dan segala hal sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi berjudul "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Desa Labuhan Baru Tahun Anggaran 2016" ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan rasa hormat dan terimakasih untuk:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Ikram, M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim, selaku Dosen Pembimbing Serta Ketua Penguji. Terimakasih telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk membimbing saya dari awal penyusunan skripsi hingga selesai. Terimakasih untuk semua ilmu yang telah bapak berikan kepada saya.

Semoga Allah memberikan balasan yang sesuai atas segalanya, karena saya tidak bisa membalas segenap kebaikan bapak.

4. Bapak Dr. Hartoyo, M.Si, selaku Dosen Pembahas. Terimakasih untuk waktu, ilmu, saran, kritik, serta arahan yang telah bapak berikan. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan bapak.
5. Bapak Drs. I Gede Sidemen, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas waktu, saran, dan arahan bapak.
6. Seluruh Dosen Sosiologi Universitas Lampung, terimakasih untuk ilmu yang bapak dan ibu berikan.
7. Seluruh perangkat desa Labuhan Baru dan masyarakat desa Labuhan Baru, terimakasih atas bantuannya selama melakukan penelitian, dan ketersediaannya menjadi responden.
8. Kedua orangtuaku yang teramat sangat kuhormati dan kusayangi. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang telah bapak mamak berikan selama ini. Kalian merupakan sosok manusia luar biasa yang pernah ada di kehidupanku. Pengorbanan, cinta, ketulusan, kesabaran, yang engkau berikan untukku selama ini merupakan alasanku untuk tidak menyerah. Maaf karena masih belum bisa memberikan yang terbaik untuk bapak dan mamak. Semoga karya kecil ini dapat mengobati lelah bapak dan mamak selama ini.
9. Ayukku dan adikku yang kusayangi, Septi Setia Negara dan Handri Setiyani. Terimakasih untuk pengertian, kasih sayang, dan segala hal yang kalian berikan kepadaku. Terlahir sebagai saudari kalian merupakan takdir terindah yang Allah berikan kepadaku.

10. Almarhumah Nenekku tersayang yang beberapa hari lalu telah meninggalkan kami. Engkau adalah sosok pelindung dalam hidupku sejak memoriku dapat mengingatnya. Segala hal yang telah kita lewati tidak akan mungkin hilang tertelan masa. Terimakasih nek untuk semua cinta dan pengorbanan nenek selama ini. Maaf jika aku terlambat mempersembahkan karya kecil ini. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk nenek.
11. Tunanganku Imam Mutholib, terimakasih telah menjadi insiprasi baruku. Terimakasih telah mendukung dan selalu menasihatiku layaknya kakak. Terimakasih untuk kasih sayangnya selama ini. Untuk saat ini, hanya karya ini yang bisa kupersembahkan untuk semua yang telah kamu berikan kepadaku. Semoga semua cita-cita dan harapan kita di Ijabah Allah, cepatlah kembali ke Indonesia.
12. Bapak dan Ibu Baruku, Bapak Katpan dan Ibu Rokayah. Terimakasih untuk dukungan, dan kasih sayangnya untukku. Tetaplah menjadi orangtuaku yang kusayangi dan kuhormati.
13. Keluarga besar Asrama Ragem Nyappuh, Ayah Didik dan Bunda Silvi, Oma, Bapak Samin, terimakasih telah menjadi orangtua asramaku. Teman sekamarku (Yesi, Yanti, Lia) serta teman-teman di lingkungan asrama (Tina, Vina, Nur, Ratih, Laras, Widya, Agung, Eko, Miko, Aspa, Faruq, Titis, dan semuanya) yang ku sayangi. Tiga tahun belajar hidup bersama kalian merupakan kenangan dan pelajaran yang luar biasa bagiku. Kalian adalah keluargaku di SMAN 2 Menggala.

14. Sahabatku Dian Lestari dan Asrofatun Nisa, Terimakasih selalu menemaniku. Kalian berdua adalah sahabat yang selalu ada dan mengerti keadaanku. Menghabiskan waktu bersama kalian merupakan hal yang berkesan bagiku. Semoga aku bukan kenangan buruk bagi kalian. Semangat berjuang untuk sajana ekonominya.
15. Sahabat seperjuangan di Sosiologi'13, Dwi Atwati, Maya Sari, Oprada, Agung, Zirwan, Salsa, Anzanis, Reva, Anita, Seppina, Lovvi, Dwi Sugeng, Elsa, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Semoga selalu dipermudahkan langkahnya, dan sukses selalu.
16. Teman-teman KKN 2016, Desa Aji Permai Talang Buah (Kak Vera, Eriq, Raka, Landoria, Gita, Shella). Meskipun kebersamaan kita hanya 60 hari, semoga itu akan selalu menjadi kenangan indah kita.
17. Teman-teman dirumah Idaman, Lia, Ika, Deni, Mbak Dian, Mbak Eka, Mbak Rizka, Mbak vita, terimakasih untuk kebersamaan selama dua tahun ini. Hidup bersama kalian mengajarkanku bagaimana mencoba mengerti oranglain, menurunkan ego, mencoba bersabar, dan menjadi lebih dewasa.
18. Teman-teman di Asrama Pelangi, (Mbak Erika, Mbak Ambar, Mbak Sinta, Mbak Dini, Mbak Tia, Mbak Nana, Inggil dan juga Vivi) terimakasih untuk empat bulan ini. Semoga kenangan ini tidak hanya menjadi angin lalu.

Akhir kata, penulis menyadari skripsi masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2017

Penulis

Panca Setiawati

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

ABSTRACT ii

ABSTRAK iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

HALAMAN PENGESAHAN v

PERNYATAAN vi

RIWAYAT HIDUP vii

MOTTO viii

PERSEMBAHAN ix

SANWACANA x

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR TABEL xvii

DAFTAR GAMBAR..... xix

I. **PENDAHULUAN**..... 1
1.1 Latar Belakang Masalah..... 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Pertanyaan Penelitian 10
1.4 Tujuan Penelitian..... 11
1.5 Manfaat Penelitian..... 11

II. TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1 Kerangka Konseptual 12
2.1.1 Tinjauan tentang Desa..... 12

2.1.2 Tinjauan tentang Dana Desa 13
2.1.3 Tinjauan tentang Efektivitas 16
2.1.4 Tinjauan tentang Pelaksanaan Pembangunan 18
2.2 Kerangka Pemikiran 19

III. METODE PENELITIAN 21
3.1 Tipe Penelitian 21
3.2 Lokasi Penelitian 22
3.3 Populasi dan Sampel 22
3.4 Definisi Konseptual 23
3.5 Definisi Operasional 26
3.6 Teknik Pengumpulan Data 28
3.7 Teknik Pengolahan Data 29
3.8 Analisis Data 30

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 34
4.1. Kondisi Umum Kabupaten Mesuji 34
4.2. Kondisi Umum Kecamatan Way Serdang 35
4.3. Kondisi Umum Desa Labuhan Baru 37
4.3.1. Letak dan Luas Wilayah 37
4.3.2. Keadaan Penduduk 38
4.3.3. Sarana dan Prasarana 40
4.3.4. Kelembagaan 41
4.4. Penerapan Dana Desa di Provinsi Lampung 42
4.5. Implementasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 43
4.6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Labuhan Baru tahun anggaran 2016-2021 45

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 48
5.1. Karakteristik Responden 48
5.1.1. Karakteristik Responden berdasarkan Kelopok Usia 49
5.1.2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 50
5.1.3. Karakteristik Responden berdasarkan Agama yang Dianut 50
5.1.4. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan Jenis Pekerjaan 51
5.1.5. Karakteristik Responden berdasarkan Suku Bangsa 52
5.2. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Subvariabel 53
5.2.1. Integrasi 53
5.2.2. Adaptasi 55
5.2.3. Pencapaian Tujuan 56
5.2.4. Ketepatan Penggunaan Anggaran 58
5.2.5. Ketepatan Penggunaan Sumberdaya Manusia 59
5.2.6. Ketepatan Penggunaan Waktu yang Tersedia 60

5.3.Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Desa Labuhan Baru 61
5.4.Uji Analisis Faktor 68
5.4.1. Menilai Indikator yang Layak 68
5.4.2. Factoring dan Rotasi 72
5.4.3. *Component Transformation Matrix* 78
5.4.4. Menentukan Label Faktor 79
5.5.Pembahasan 80

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 85
6.1.Kesimpulan 85
6.2.Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Definisi Operasional 27
2. Daftar Desa di Kecamatan Way Serdang dengan Luas Wilayah 36
3. Komposisi Penduduk Desa Labuhan Baru 38
4. Sarana dan prasarana Desa Labuhan Baru 40
5. Kelembagaan Desa Labuhan Baru 41
6. Karakteristik Responden berdasarkan Agama yang Dianut 51
7. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan 52
8. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Subvariabel Integrasi 55
9. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Subvariabel Adaptasi ... 56
10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Subvariabel Pencapaian Tujuan 57
11. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Subvariabel Ketepatan Penggunaan Anggaran 58
12. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Subvariabel Ketepatan Penggunaan Sumberdaya Manusia 59
13. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Subvariabel Ketepatan Penggunaan Waktu yang Tersedia 61
14. Kategorisasi Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa 62
15. Kategorisasi Tingkat Efektivitas pada Subvariabel yang diteliti 63
16. Hasil Kategorisasi Tingkat Efektivitas Persubvariabel 64
17. Hasil Pengujian Pertama *KMO & Bartlett's Test* 69
18. Hasil Pengujian Pertama *Anti Image Correlations* 70
19. Hasil Pengujian Kedua *KMO & Bartlett's Test* 70
20. Hasil Pengujian Kedua *Anti Image Correlations* 71
21. *Communalities* 72
22. Total *Varian Explained* 74
23. Total *Rotated Component Matrix* 76

24. Pengelompokan Anggota Faktor..... 77
25. *Component Transformation Matrix* 78
26. Besaran Kontribusi pada Masing-masing Faktor..... 82
27. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Faktor Akuntabel..... 84

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

1. Peta Kabupaten Mesuji 35
2. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 38
3. Profesi Penduduk Desa Labuhan Baru..... 39
4. Jembatan Realisasi Dana Desa 2015..... 44
5. Gapura Selamat Datang Wujud Realisasi Dana Desa 2015..... 44
6. Drainasi Wujud Realisasi Dana Desa 2015 45
7. Bantuan untuk Pembangunan Pondok Pesantren dari Dana Desa 2015..... 45
8. Karakteristik Responden berdasarkan Kelompok Usia 49
9. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin..... 50
10. Karakteristik Responden berdasarkan Suku Bangsa..... 53
11. Jalan Desa Labuhan Baru Hasil Pembangunan DD 2016..... 65
12. Jalan Desa Labuhan Baru Hasil Pembangunan DD 2016..... 66
13. Jalan Desa Labuhan Baru Hasil Pembangunan DD 2016..... 66
14. Plang Informasi dari Pembangunan Jalan DD 2016..... 67

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya saat ini menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut hal ini berarti bahwa pemerintah Indonesia memberikan kekuasaan dan kesempatan kepada setiap daerah otonom untuk menjalankan otonomi daerahnya masing-masing guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Jurnaidi, Djumadi, dan Paranoan, 2015). Kebebasan wilayah otonom untuk mengatur dan menentukan sendiri kebijakan-kebijakan pembangunan daerah merupakan strategi baru yang diterapkan oleh pemerintah setelah kegagalan penerapan kebijakan pembangunan pada masa orde lama dan orde baru.

Kegagalan yang terjadi selama dua masa tersebut disebabkan karena tahap penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program tidak melibatkan masyarakat lokal sehingga program yang diterapkan pemerintah pusat kurang efektif untuk masyarakat (Saputra, 2016). Lebih lanjut Saputra (2016) menjelaskan bahwa pembangunan pada masa orde lama dan orde baru lebih menekankan

pada kebijakan pembangunan dibidang pertanian dan perekonomian masyarakat saja. Selain itu, pembangunan pada masa orde lama dan baru lebih bersifat sentralistis yang artinya semua kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sehingga bentuk kebijakan yang diterapkan untuk semua daerah sama, karena memandang semua daerah dan atau desa memiliki kebutuhan dan permasalahan yang sama. Berdasarkan kebijakan sentralistis tersebut perkembangan desa akhirnya mengalami ketimpangan sebagai akibat dari perlakuan kebijakan yang sama untuk permasalahan yang berbeda.

Pakar lainnya (Sumpeno, 2011) juga menjabarkan terkait kebijakan yang pernah diterapkan dalam pembangunan desa pada masa orde lama yaitu seperti, *landreform*, kasimo plan, repelita, desa swasembada, IDT (Inpres Desa Tertinggal), program pengembangan terpadu, koperasi kerakyatan, transmigrasi desa, dan UUPA (undang-undang penguatan agrarian). Sedangkan pada masa orde baru kebijakan-kebijakan yang pernah diberlakukan sebagai suatu upaya pembangunan antara lain yaitu PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), program pemberdayaan masyarakat desa melalui BPMD seperti PKK dan simpan pinjam karang taruna, program pembangunan desa sejahtera (mencakup pilar kesehatan, pendidikan, kebudayaan, lingkungan dan kewirausahaan), BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), dan lain-lain.

Sumpeno (2011) juga menilai bahwa sebagian besar kebijakan mengalami kegagalan karena kurangnya kemampuan pemerintah mengelola kebijakan tersebut. Kegagalan masa orde baru yang melahirkan reformasi mengubah

asas penyelenggaran pemerintahan Indonesia beserta yang ada di dalamnya termasuk kebijakan pembangunan desa. Kebijakan-kebijakan yang dulu bersifat *top-down* pada masa reformasi berubah menjadi *bottom-up*. Hal ini karena kebijakan yang selalu diputuskan oleh pemerintah kurang sesuai dengan apa yang menjadi jawaban dari permasalahan yang ada di masyarakat. Masyarakat perlu menentukan kebijakan bagi mereka sendiri sesuai dengan hak otonomi yang telah diterapkan.

Kebijakan terkait pembangunan desa tidak hanya menjadi isu penting di Indonesia. Kebijakan yang mengutamakan desa juga diterapkan di berbagai negara lain. Wijaya (2013) dalam tulisannya *Contemporary problems in Japan's rural areas and opportunities for developing rural tourism: a case of yamashiro district in yamaghuci prefecture* menjelaskan bagaimana Negara Jepang mencoba menerapkan kebijakan baru terkait pembangunan pedesaan. Pedesaan Jepang yang awalnya merupakan desa wisata mengalami penurunan minat para pengunjung, akhirnya menerapkan kebijakan baru untuk menghidupkan kembali pesona pedesaan. Strategi yang digunakan adalah dengan melibatkan para pemuda dan perempuan yang awalnya tidak diikutsertakan dalam pembangunan. Selain itu, dalam strategi tersebut Jepang juga memasukkan unsur agro-budaya mereka.

Negara lainnya yang juga mengedepankan perspektif pembangunan pedesaan ialah Korea Selatan. Lee (1990) dalam tulisannya *Policy and Rule Configuration: Korean Rural Development Movement Saemaul Undong* menggambarkan upaya Korea Selatan dalam 'membangun pedesaan' yang di awali pada tahun 1970. Pembangunan di Korea Selatan diawali dari

pergerakan petani yang menuntut hak atas pembangunan pedesaan. Pada tahun 1970 tersebut Korea Selatan mengalami ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaannya. Berdasarkan pergerakan tersebut maka akhirnya wilayah pedesaan Korea Selatan memperoleh perhatian dari pemerintah pusat, hal ini ditandai dengan ditetapkannya kebijakan *rural development through cooperative village self-reliance* oleh Presiden Chung Hee Park, dan kebijakan ini lebih dikenal dengan kebijakan *Saemaul Undong*.

Gambaran tentang dua negara di atas merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa kebijakan terkait pembangunan desa telah banyak diterapkan di negara lain tidak hanya di Indonesia. Hal ini karena desa merupakan salah satu unsur negara yang juga membutuhkan sentuhan pembangunan. Sehingga pembangunan di desa akan mengalami peningkatan kemajuan layaknya di wilayah kota. Pencapaian pemerataan pembangunan antara perkotaan dengan pedesaan dalam negara menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan perlakuan yang sama dalam pembangunan bagi semua unsur-unsur di dalamnya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, di Indonesia desa dikenal sebagai administrasi pemerintahan terkecil. Saat ini Indonesia memiliki 74.093 desa dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang bervariasi, yaitu penduduk antara 100-1600 kepala keluarga (KK) dan luas dari 1-190Km^2 (KPK, 2015). Banyaknya desa yang ada di Indonesia mengharuskan pemerintah Indonesia lebih memperhatikan pembangunan di desa, yang membutuhkan pemerataan pembangunan. Salah satu pendiri

Republik ini, Sutan Sjahrir pernah mengungkapkan bahwa desa merupakan salah satu ukuran penting bagi Negara Indonesia untuk mencapai suatu kesejahteraan dan kemajuan pembangunan (Zakaria, 2013, p.3).

Penerapan kebijakan pembangunan terpusat pada desa memiliki arti bahwa, desa berkewenangan dalam menjalankan pembangunan dan berkewajiban untuk pembangunan di desanya sendiri. Pembangunan disini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik namun juga pembangunan secara sosial seperti pemberdayaan masyarakat desa. Kondisi ideal yang diharapkan dari suatu negara adalah bagaiamana seluruh rakyatnya dapat merasakan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, serta mempunyai kehidupan yang layak, dan tidak hidup dalam keadaan miskin.

Perbedaan tempat tinggal antara perkotaan dan pedesaan, bukan merupakan salah satu alasan kehidupan rakyat menjadi sangat jauh berbeda. Namun pada kenyataannya, pedesaaan Indonesia identik dengan daerah pinggiran, minimnya segala hal baik kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, maupun sosial-ekonomi. Ketidakseimbangan pembangunan antara desa dan kota menyebabkan banyaknya penduduk desa akhirnya melakukan urbanisaasi besar-besaran.

Polemik-polemik yang terjadi di pedesaan di Indonesia menjadi salah satu pemicu gagasan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Indonesia akhirnya optimis dengan menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia sebagai pusat perekonomian yang menyejahterakan (Hayu, 2015). Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2014, dikeluarkanlah kebijakan baru yaitu Dana Desa (DD). Kebijakan DD ini di atur dalam PP 22/2015

perubahan dari pasal 14, pasal 18, pasal 23, dan pasal 28 dalam PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN (PMK, 2016).

Peraturan tersebut kemudian juga dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran ini diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan (Permenkeu, 2016).

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kemendesa) (2016) menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa ini berdasarkan pada tiga prinsip yaitu keadilan, kebutuhan prioritas dan tipologi desa. Berdasarkan pada prinsip keadilan maka dana desa harus diolah sebagaimana kebutuhan yang ada di desa. Prinsip kebutuhan proritas menegaskan bahwa dana desa harus digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk prinsip tipologi desa, faktor yang harus diperhatikan adalah kondisi desa yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu desa tertinggal/sangat tertinggal, desa berkembang, dan desa maju atau mandiri.

Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan, untuk pemerataan penyaluran dana desa, pada tahun 2015 masih mencapai 65% dari jumlah desa-desa di seluruh Indonesia. Sebesar 35% belum mendapatkan bantuan

dana desa tersebut. Jumlah keseluruhan dana desa untuk tahun anggaran 2015 yang dapat tersalurkan yaitu sebanyak 434 kabupaten/kota dari 511 kabupaten/kota di Indonesia, atau 74.093 desa dari 82.353 desa (Kurniati, 2015).

Selain pemerataan penyaluran dana desa yang belum mencakup keseluruhan desa, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu terkait Pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang dimaksud yaitu mulai dari tahap perencanaan, penganggaran program, penggunaan, pengawasan, dan sampai dengan pertanggung jawaban. Pengelolaan dana desa saat ini dinilai masih kurang efektif sehingga hal ini menjadi sorotan utama bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan (Putra, Pratiwi, dan Suwondo, 2014).

Apabila dikaji lebih lanjut, dalam pengelolaan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal ini sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, bahwa setidaknya terdapat empat asas yang harus diperhatikan sebagai wujud pengelolaan yang baik, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabel, dan disipiln dan tertib anggaran. Keempat faktor tersebut dikenal sebagai asas pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dapat dikatakan berhasil atau tidaknya apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku. (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa pembangunan desa di Indonesia merupakan salah satu isu

penting yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo menggagas kebijakan baru yaitu dana desa yang mulai berlaku pada tahun 2015. Pemberlakuan kebijakan baru ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah, untuk menyamaratakan pembangunan sehingga diharapkan tidak ada lagi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia.

Terkait kebijakan DD yang saat ini tengah berlaku di Indonesia, menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait efektivitas pengelolaan dan implementasi kebijakan. Setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, maka tidak serta merta pengelolaan dana desa juga berjalan sesuai ketentuan. Hal ini sesuai dengan banyaknya penelitian-penelitian terdahulu yang mencoba mengkaji efektivitas pengelolaan dana desa.

Penelitian tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Darmi (2016) yang membahas tentang peranan perempuan dalam pengelolaan dana desa di Provinsi Bengkulu. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa melibatkan peranan perempuan dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu strategi dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya yaitu penelitian terkait Dana Desa yang dilakukan oleh Listiyani dan Pambudi (2016) yang mengangkat judul tentang efektivitas implementasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Munitalan Kabupaten Magelang. Tujuan dari penelitian adalah untuk melihat efektivitas pengelolaan DD serta melihat faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi DD.

Selain penelitian terkait dana desa, penelitian serupa juga telah dilakukan yaitu tentang alokasi dana desa yang dilakukan oleh Putra, Pratiwi, dan

Suwondo (2014) yang mengkaji tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, Malang. Penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Jurniadi, Djumadi dan Paranoan (2015) yang mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa di Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa ataupun alokasi dana desa memiliki tingkat kerentanan yang tinggi untuk menimbulkan disalokasi anggaran sehingga hal ini menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Keterlibatan masyarakat setempat merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan saja, namun dapat terlibat langsung ataupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebuah keberhasilan yang dicapai oleh desa tidak hanya tergantung pada aparatur desanya saja.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, pada kajian penelitian ini fokus yang diambil yakni tentang penilaian efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Labuhan Baru. Penilaian perihal efektivitas pengelolaan dana desa tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Labuhan Baru, yang mana masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus terlibat dalam implementasi dana desa. Selanjutnya, dalam penelitian ini untuk menilai efektivitas pengelolaan dana desa merujuk pada enam subvariabel yaitu integrasi, adaptasi, pencapaian tujuan, ketepatan penggunaan anggaran, ketepatan penggunaan sumber daya manusia, dan

ketepatan penggunaan waktu yang tersedia. Keenam subvariabel tersebut secara tidak langsung harus sesuai dengan empat asas yang menjadi ketentuan pengelolaan DD. Asas tersebut yaitu partisipasi, transparansi, akuntabel, serta disiplin dan tertib anggaran.

Kajian lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan analisis faktor guna mereduksi subvariabel yang digunakan menjadi lebih ringkas (faktor). Selain itu, analisis faktor juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana faktor terbentuk memiliki berkontribusi terhadap persepsi masyarakat tentang efektivitas pengelolaan DD pada pembangunan jalan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan antara lain:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat perihal efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan tahun anggaran 2016 di Desa Labuhan Baru?
2. Setelah melakukan reduksi data (analisis faktor) dan mengetahui jumlah faktor terbentuk, faktor manakah yang memiliki kontribusi (persentase) tertinggi pada efektivitas pengelolaan dana desa (DD) pada pelaksanaan pembangunan jalan desa di Desa Labuhan Baru?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk:

1. Menjelaskan dan mengkaji penilaian atau persepsi masyarakat tentang efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Labuhan Baru untuk tahun anggaran 2016.
2. Selanjutnya yakni untuk mengetahui jumlah faktor baru yang terbentuk setelah dilakukannya uji analisis faktor, yang dapat mewakili keseluruhan indikator yang digunakan. Selain itu, lebih lanjut pada faktor baru tersebut juga dapat diketahui tingkatan kontribusi (persentase) yang dihasilkan untuk penilaian masyarakat perihal efektivitas pengelolaan dana desa, khususnya pada pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Labuhan Baru.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif seputar penilaian masyarakat tentang efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Labuhan Baru.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memperluas pengetahuan dan sebagai sebagai bahan pertimbangan, dan evaluasi bagi *stakeholders* terkait pelaksanan kebijakan. Pada penelitian ini khususnya bagi pemerintah desa sebagai pengelola dana desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Konseptual

2.1.1. Tinjauan tentang Desa

Konsepsi tentang desa banyak dijelaskan oleh para ahli dalam berbagai literatur. Konsepsi desa seperti yang dikemukakan oleh Yayuk dan Mangku (2003), yaitu berasal dari bahasa India *swadesi* yang artinya tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batasan yang jelas. Sedangkan Kuntjaraningrat (1977) mendefinisikan desa merupakan komunitas kecil yang menetap di suatu daerah (Sumpeno, 2011 p.2). Lebih lanjut dibahas pula pada Bab 1, ketentuan Umum, pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten" (Sumpeno, 2011 p.3).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan tempat asal, atau tanah kelahiran yang terbentuk atas dasar nilai budaya,

memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan sendiri kebutuhan masyarakatnya serta diakui dalam hukum pemerintahan nasional.

Pemerintahan desa memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari badan perwakilan desa, kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, sampai dengan jajaran-jajaran di bawahnya seperti ketua rukun tetangga. Fungsi dari struktur pemerintahan desa ini adalah untuk menjalankan roda pemerintahan di desa sehingga dapat bergerak sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki desa.

2.1.2. Tinjauan tentang Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 dijelaskna bahwa "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat". Selanjutnya Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 bahwa "Alokasi dana desa merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarannya dihitung dengan cara 90 persen dari Anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional" (PMK, 2016).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat tarik kesimpulan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diterima oleh desa-desa yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai stimulan dalam pendanaan pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

a. Asas Pengelolaan Dana Desa

Fungsi dana desa atau yang biasa dikenal dengan istilah DD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dana desa yang diperuntukkan bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat harus diolah serta digunakan dengan baik dan tepat guna oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa.

Pada pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan desa dalam rangka mengimplementasikan dana desa yang ada harus sesuai dengan asas pengelolaan dana desa yang telah ditentukan. Berdasarkan Permendagri No. 113/2014, Bab II Pasal 2 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa harus sesuai asas pengelolaan yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Keuangan desa, 2015).

Asas pertama yaitu partisipatif yang artinya dalam proses pengelolaan anggaran serta pelaksanaan pembangunan di desa tidak hanya melibatkan kaum elit desa (pejabat pemerintah desa) tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal baik pemuda, perempuan, petani dan lain sebagainya untuk dapat menciptakan pembangunan yang tepat guna. Asas yang kedua yaitu

Akuntabel artinya perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2015, p: 35).

Ketiga yaitu Transparansi yang artinya keterbukaan, semua pihak dapat melihat keseluruhan informasi dari penggunaan anggaran. Hak untuk mengetahui tentang keuangan desa dengan adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Terakhir yaitu tertib dan disiplin anggaran yang artinya pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Renyowijoyo,2013).

Berdasarkan penjabaran terkait asas pengelolaan dana desa di atas maka sudah seharusnya dalam implementasi kebijakan dana desa harus melibatkan asas tersebut sebagai wujud pengelolaan yang baik. Implementasi dana desa terkait pembangunan yang dilaksanakan di desa harus melibatkan asas pengelolaan karena dengan adanya partisipasi, akuntabel, transaparansi, serta tertib dan disiplin aggaran dalam pengelolaannya kebijakan yang diterapkan akan lebih tepat guna. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang ditetapkan oleh desa harus dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa, sehingga dalam hal ini partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam penentuan kebijakan pembangunan desa (Kemendesa, 2016).

Lebih lanjut Kemendesa (2016) juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang harus ada dalam implementasi kebijakan di desa adalah sebagai pendamping dalam pembangunan desa dan pemantau ketepatan praktik penerapan program oleh pemerintah desa. Berdasarkan hal tersebut

maka dalam pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat lokal tidak dapat diabaikan partisipasinya dan tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan.

2.1.3. Tinjauan tentang Efektivitas

Konsepsi terkait efektivitas menurut pendapat para ahli berbeda-beda dan beragam. Menurut Makmur (2015, p.6) "efektivitas merupakan suatu ketepatan yang terjadi antara harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai". Selanjutnya Liang Gie (2004) berpendapat bahwa "Efektivitas merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang di kehendaki (Ardila, 2015, p.4). Pakar lainnya (Steers, 1985, p.87) mengungkapkan pendapatnya bahwa: "Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tidak memberi tekanan yang terhadap pelaksanaannya". Begitu juga dengan Sedarmayati (2009, p.59) yang menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang diberikan untuk menilai seberapa jauh/besar pencapaian target yang telah di tentukan sebelumnya dapat tercapai. Apabila persentase pencapaiannya tujuan semakin tinggi maka hal ini berarti bahwa semakin tinggi pula nilai efektivitasnya.

a. Ukuran Efektivitas.

Terkait efektivitas, dalam penelitian ini efektivitas pada pelaksanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan atau ketepatan penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pendapat Duncan, untuk dapat mengetahui efektivitas dapat dilakukan dengan menilai atau mengukur hal-hal berikut (Steers, 1985 p.53):

1) Intergrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
2) Adaptasi, merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.
3) Pencapaian tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

Berbeda dengan pendapat Duncan di atas, Makmur (2015, p.7) berpendapat bahwa untuk dapat mengetahui efektivitas dari suatu pembangunan adalah dengan cara menilai komponen di bawah ini:

1) Ketepatan penggunaan anggaran, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang dialokasikan dan ditentukan sebelumnya untuk pelaksanaan program pembangunan.
2) Ketepatan penggunaan sumber daya manusia, merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam memilih pihak-pihak yang menjalankan program pembangunan. Pemilihan ini dilakukan supaya pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
3) Ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan, dalam hal ini perlengkapan yang akan digunakan selama proses pelaksanaan

pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat sendiri.

4) Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia, seluruh aktivitas yang dilakukan dalam proses pembangunan dapat disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan waktu yang diperlukan lebih banyak maka hal ini juga berarti bahwa pelaksanaan pembangunan kurang efektif.
5) Ketepatan penggunaan sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya alam yang ada harus digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan untuk pengkategorian tingkat efektivitas dapat dilihat dari pencapaian target dalam pelaksanaan suatu program pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Supranto (2000), maka dalam penelitian ini dilakukan pengategorian menjadi 5 kelas atau tingkatan yaitu "sangat tidak efektif, tidak efektif, cukup efektif, efektif, dan sangat efektif".

2.1.4. Tinjauan tentang Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan menurut Alexander (1994) adalah "proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya". Pakar lain (Ginanjar Kartasasmita, 1994) berpendapat bahwa pembangunan merupakan "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana" (Pasaribu, 2005 p.16). Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sondang P. Siagaan (2000) yang menyatakan "pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan

bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *(nasional building)"* (Makmur, 2015, p.118). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan perubahan seluruh aspek kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang sedang dijalankan untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan konteks yang akan dikaji lebih lanjut maka dalam hal ini pelaksanaan pembangunan yang menjadi fokus adalah pembangunan yang bersifat fisik. Pembangunan fisik dalam hal ini seperti pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa dilakukan oleh seluruh aparatur desa beserta masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Indikator keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat dari pencapaian yang dilakukan berdasarkan pada ketetapan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin besar Persentase pencapaian target dalam pelaksanaan pembanguanan maka pembanguna tersebut dapat dikatakan berhasil.

2.2. Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan nasional. Otonomi disini dimaksudkan agar

setiap daerah dapat merencanakan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhannya. Pada pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan terkait bantuan dana bagi setiap desa yaitu dana desa. Dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, serta untuk pemberdayaan masyarakat desa. Adanya dana desa ini juga diharapkan mampu menghapuskan kesenjangan antara pembangunan desa dan kota.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu menyoroti sisi efektivitas pengelolaan dana desa dari segi penilaian masyarakat. Pada penelitian ini masyarakat yang dimaksud yakni masyarakat Desa Labuhan Baru, dan memiliki kriteria yang telah ditentukan. Hal ini dirasa penting untuk dikaji karena masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam implementasi kebijakan dana desa. Lebih lanjut, terkait dengan penilaian efektivitas pengelolaan dana desa, dalam penelitian ini penilaian efektivitas dilakukan dengan menggunakan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini ditentukan dengan menggunakan interval kelas (Supranto, 2000). Berdasarkan hal tersebut, maka hasil penelitian yang telah diolah akan dikategorikan kedalam lima kelas tersebut.

Selain efektivitasnya, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis faktor. Penggunaan analisis faktor dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran kontribusi yang dihasilkan dari subvariabel yang digunakan (enam subvariabel). Sehingga dapat diketahui tingkatan kontribusi mulai dari yang tertinggi sampai terendah, untuk penilaian masyarakat perihal efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Labuhan Baru. Pada pendekatan kuantitatif, secara primer digunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Selanjutnya dilakukan dokumentasi sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Sedangkan untuk jenis penelitiannya, yang digunakan adalah deskriptif dan eksplanatori. Jenis deskriptif disini berarti bahwa hasil penelitian dapat menggambarkan secara rinci terkait fokus penelitian yaitu persepsi masyarakat tentang efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Labuhan Baru. Sedangkan untuk eskplanatori berarti bahwa dalam penelitian ini dijelaskan lebih rinci perihal penilaian masyarakat untuk efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Labuhan Baru.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Labuhan Baru, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Penentuan lokasi tersebut dikarenakan Desa Labuhan Baru merupakan salah satu desa yang menerima dana desa. Desa Labuhan Baru juga merupakan wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Mesuji. Selain itu, di desa tersebut saat ini sedang berjalan program-program pembangunan sebagai wujud implementasi dana desa. Sehingga desa Labuhan Baru dirasa tepat untuk dijadikan lokasi penelitian, guna memperoleh data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian terkait.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Bersumber dari data desa Labuhan Baru tahun 2016 diketahui bahwa jumlah penduduk desa Labuhan Baru adalah sebanyak 1.745 orang. Sedangkan untuk penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *Purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* berarti juga bahwa sampel penelitian akan dipilih berdasarkan keriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah penduduk Labuhan Baru yang berpotensi menjadi responden adalah seluruh penduduk yang berada dalam rentan usia ≥25 tahun yaitu sebanyak 1.050 orang. Menurut Prasetyo & Jannah (2012) salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan besaran sampel adalah dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah anggota sampel

N = Banyaknya populasi

e = Estimasi kesalahan

Perhitungan sampel berdasarkan rumus tersebut dengan menggunakan estimasi kesalahan sebesar 10% adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1050}{1 + 1050\ (0.1)^2}$$

$$n = \frac{1050}{1 + 1050\ (0.01)}$$

$$n = \frac{1050}{1 + 10.50}$$

$$n = \frac{1050}{11.50}$$

$$n = 91.32$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 92 orang dengan rentan usia ≥ 25 tahun.

3.4. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini lebih lanjut akan dijabarkan dibawah ini, antara lain adalah:

3.4.1. Desa

Desa merupakan administratif terkecil dari bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia, memiliki batas wilayah, dan kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat.

3.4.2. Dana desa (DD)

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN, diperuntukkan bagi desa untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa harus mencakup empat asas, di antaranya adalah:

a) Partisipatif, yaitu keikutsertaan serta keterlibatan masyarakat desa dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan desa.
b) Transparasi, yaitu kejujuran dan keterbukaan informasi seluas-luasnya bagi *stakeholders* untuk mengetahui setiap detail kegunaan anggaran dari DD di desa.
c) Akuntabel, yaitu pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa.
d) Tertib dan displin anggaran, yaitu informasi yang harus disampaikan terkait kecukupan dana yang diperoleh pemerintah desa untuk membiayai seluruh pengeluaran desa serta ketepatan waktu yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan.

3.4.3. Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan pemerintah desa untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya dengan memperhatikan kuantitas, kualitas, dan waktu. Apabila pencapaian tujuan semakin besar, maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif dalam menjalankan suatu program. Terkait penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pegelolaan DD dalam pelaksanaan pembangunan yang diukur berdasarkan penilaian masyarakat, maka definisi konseptual yang digunakan dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bias selama penelitian dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka ukuran efektivitas yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi pemerintah desa (aparatur desa) sebagai pengelola DD untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi antara pengelola dan masyarakat.
2) Adaptasi, merupakan kemampuan aparatur desa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai upaya pendekatan dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
3) Pencapaian tujuan, adalah keseluruhan upaya yang dilakukan oleh aparatur desa untuk dapat mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan perencanaan.
4) Ketepatan penggunaan anggaran, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran dana desa yang

dialokasikan dan ditentukan sebelumnya untuk pelaksanaan program pembangunan.

5) Ketepatan penggunaan sumber daya manusia, merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam memilih pihak-pihak yang akan menjalankan program pembangunan.
6) Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia, seluruh aktivitas yang dilakukan dalam proses pembangunan dapat disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan waktu yang diperlukan lebih banyak maka hal ini juga berarti bahwa pelaksanaan pembangunan kurang efektif.

3.5. Definisi Operasional

Operasionalisasi dari konsep yang telah ditentukan di atas kemudian disusun kedalam bentuk instrumen. Instrumen ini yang kemudian dikembangkan untuk mendapatkan pernyataan dalam penelitian dalam kuesioner. Berdasarkan variabel penelitian yaitu persepsi masyarakat perihal efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan tahun anggaran 2016 di Desa Labuhan Baru, maka definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional

Dimensi	Indikator	Instrumen	Skala
Integrasi	1. Sumber pengetahuan masyarakat tentang dana desa a). Aparatur desa b). Keluarga/ Tetangga/ Teman c). Media sosial/ Cetak/ TV 2. Pengetahuan masyarakat tentang fungsi dana desa 3. Pengenalan dana desa a). Intensitas sosialisasi dari pemerintah desa b). Metode yang digunakan untuk mengenalkan dana desa 4. Penyusunan program implementasi dana desa a). Musrenbang Desa ➢ Keikutsetaan masyarakat dalam musrenbang desa ➢ Kesempatan menyampaikan pendapat dalam musrenbang desa b). Implementasi pembangunan jalan dilakukan tanpa musrenbang desa.	kuesioner	Ordinal
Adaptasi	• Usaha yang dilakukan oleh aparatur desa dalam menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat sekitar tentang pelaksanaan pembangunan yang merupakan bagian dari implementasi DD a). Studi lapangan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari pembangunan jalan yang direncanakan. b). Verifikasi perencanaan untuk menetapkan prioritas perencanaan.	Kuesioner	Ordinal
Pencapaian tujuan	1. Pelaksanaan pembangunan jalan desa berjalan sesuai dengan perencanaan 2. Keikutsertaan/partisipasi masyarakat dalam pelaksaan pembangunan jalan 3. Sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksaan pembangunan jalan (dapat berupa tenaga) 4. Keberhasilan dalam pembangunan jalan a). pembangunan jalan sesuai dengan kebutuhan masyakat pada umumnya. b). Pembangunan jalan pada jalur bisnis yang menguntungkan pihak tertentu. c). Hasil pembangunan (fisik) tepat guna.	Kuesioner	Ordinal

Dimensi	Indikator	Instrumen	Skala
Ketepatan penggunaan anggaran	1. Rancangan dana untuk pelaksanaan pembangunan jalan 2. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pembangunan jalan a). Transparansi anggaran dari pemerintahan desa pada pelaksanaan pembangunan jalan. b). Penilaian masyarakat terkait perbandingan antara besaran dana yang dikeluarkan dengan hasil pembangunan yang dihasilkan. 3. Anggaran dana yang dirancang sebelumnya dapat mengendalikan pengeluaran pemerintah desa.	Kuesioner	Ordinal
Ketepatan penggunaan sumberdaya manusia	1. Ketepatan penggunaan tenaga ahli pelaksana pembangunan jalan. a). kualitas pekerja pelaksana pembangunan jalan b). Kuantitas pekerja pelaksana pembangunan jalan c). Intensitas pekerja dalam melaksanakan pembangunan jalan 2. Pengawas selama pelaksanaan pembangunan jalan	Kuesioner	Ordinal
Ketepatan penggunaan waktu	1. Waktu pelaksaan pembangunan jalan sesuai dengan ketentuan (1 Tahun pelaksanaan) 2. Pelaksanaan pembangunan jalan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya.	Kuesioner	Ordinal

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan penyebaran kuesioner sebagai instrumen utama dalam penelitian. Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga melakukan doukmentasi untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Selanjutnya, setelah penyebaran kuesioner

dilakukan maka data hasil penelitian ini diedit terlebih dahulu, kemudian ditabulasi, dan selanjutnya dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

Adapun hal-hal yang dilakukan dalam proses pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan antara lain yaitu meminta izin kepada aparatur desa, penyebaran kuesioner, serta dokumentasi. Perihal proses permohonan izin penelitian, dikarenakan Desa Labuhan Baru merupakan desa peneliti, maka proses perizinan dapat dilakukan dengan tanpa kendala. Setelah memperoleh izin dari desa, selanjutnya yaitu penyebaran kuesiner. Penyebaran dilakukan dengan mendatangi masyarakat desa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti sendiri, dan memerlukan waktu selama satu bulan (bulan januari, 2017) dengan melakukan penyebaran kuesiner sebanyak 13 kali. Adapun kendala yang dihadapi selama prose pengumpulan data yakni terdapat beberapa masyarakat yanng tidak bersedia menjadi responden, masyarakat sulit untuk dijumpai, dan kenyataan bahwa masyarakat tidak mengetahui dana desa. Proses terakhir dalam tahap pengumpulan data yaitu melakukan dokumentasi pada hasil pembangunan yang telah dilakukan di Desa Labuhan Baru. Proses ini memerlukan waktu sekitar 5 hari.

3.7. Teknik Pengelolaan Data

Tahapan yang perlu dilakukan setelah data penelitian terkumpul yaitu pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.7.1. Editing

Editing merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan setelah data lapangan diperoleh. Pada penelitian ini, editing yang dilakukan yaitu pengecekan kembali kelengkapan jawaban dalam kuesioner. Proses editing ini selalu dilakukan setiap selesai turun lapang. Apabila terdapat kuesiner yang tidak lengkap maka peneliti harus mengunjungi lagi responden guna melengkapi data.

3.7.2. Koding

Koding merupakan proses mengelompokkan jawaban-jawaban dari kuesioner yang telah di isi responden sesuai dengan jenisnya. Pada penelitian ini proses koding dilakukan dengan membuat buku koding (lampiran). Pembuatan buku koding bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kode-kode yang digunakan.

3.7.3. Tabulasi

Tabulasi merupakan tahap penyusunan data dari lapangan menjadi data tabel dengan menggunakan aplikasi/program olah data statistik. Tabulasi dilakukan sebagai tahap awal sebelum pengolahan data dilakukan. Pada penelitian ini tabulasi data juga dilakukan (lampiran).

3.8. Analisis Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2007) untuk mengetahui tingkat efektivitas, yang khususnya dalam penelitian yakni penilaian masyarakat

perihal efektivitas pengelolaan DD, maka dapat dilakukan analisis sederhana. Lebih lanjut Mahmudi (2007) menjelaskan bahwa efektivitas suatu program pembangunan merupakan sebuah hubungan antara output dengan tujuan. Sedangkan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang efektivitas dari pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan, sesuai dengan pendapat Supranto (2000) maka dalam penelitian in telah dilakukan pengkategorian menjadi 5 kelas. Kelima kelas tersebut yaitu "sangat tidak efektif, tidak efektif, cukup efektif, efektif, dan sangat efektif". Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kelas bagi distribusi frekuensi yaitu, jumlah kelas (5), lebar kelas, dan batas kelas. Hal tersebut sesuai dengan rumus berikut:

$$c = \frac{Xn - X1}{k}$$

Dimana c = Perkiraan besarnya (*class, width, class size, class leght*)

k = Banyaknya kelas (5)

Xn = Nilai observasi terbesar

X1 = Nilai observasi terkecil

Terkait ketentuan yang telah dtetapkan sesuai dengan rumus di atas, dalam penelitian ini jumlah kelas yang digunakan adalah 5 kelas. Sehingga dalam tahap penentuan besaran nilai dalam kelas interval tidak lagi mencari jumlah kelas terlebih dahulu.

Setelah diketahui kategori efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan di Desa Labuhan Baru berdasarkan penilaian masyarakat, maka tahap selanjutnya yakni analisis faktor. Menurut Santoso (2014, p.57) "analisis

faktor merupakan analisis yang mencoba menemukan hubungan diantara sejumlah variabel-variabel yang saling independen antara satu dengan yang lainnya, sehingga dibentuk satu atau beberapa kumpulan variabel (faktor) yang lebih sedikit".

Lebih lanjut Effendi (2015) menjelaskan bahwa tujuan dari analisis faktor adalah untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel, mereduksi sejumlah variabel menjadi lebih sedikit, uji validitas dan reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmatori, serta menjelaskan struktur hubungan di antara variabel. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis faktor dalam penelitian ini akan digunakan untuk mereduksi sejumlah subvariabel yang digunakan, serta untuk melihat korelasi dari faktor terbentuk dalam pelaksanaan pembangunan jalan.

Jenis analisis faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Explanatory factor analysis*. Pada jenis ini, analisis faktor digunakan untuk mereduksi sejumlah variabel/subvariabel menjadi lebih ringkas (Widhiarso, 2009). Sedangkan untuk pengerjaan tahap analisisnya akan dilakukan dengan menggunakan program olah data statistik SPSS 16. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam analisis faktor yaitu:

a) Menilai subvariabel yang layak, dengan melihat nilai KMO dan nilai anti-*image correlation.*
b) Proses *factoring* dan rotasi, hal ini dilakukan dengan memperhatikan nilai pada *communalities, total variance explained, component matrix,* dan rotated *component matrix*.

c) Menentukan label faktor, setelah diketahui jumlah faktor yang terbentuk, maka selanjutnya adalah pelabelan faktor. Pelabelan ini dilakukan guna mempermudah peneliti dalam mengenali faktor baru.

Setelah selesai dilakukan analisis faktor, maka selanjutnya yakni mengetahui tingkatan kontribusi (persentase) yang dihasilkan dari faktor-faktor terbentuk untuk persepsi masyarakat perihal efektivitas pengelolaan DD.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kondisi Umum Kabupaten Mesuji

Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten Mesuji resmi berdiri pada 29 oktober 2008, yang pada awalnya merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Tulang Bawang. Secara Geografis Mesuji Merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang berbatasan langsung berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Mesuji tercatat 2.184 Km^2 dan saat ini memiliki 7 kecamatan yaitu Way Serdang, Mesuji Timur, Rawajitu Utara, Simpang Pematang, Tanjung Raya, Mesuji, dan Panca Jaya. Kecamatan dengan luas yang paling sempit adalah Kecamatan Simpang Pematang dengan Luas 139,62 Km^2 sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Mesuji Timur (810,20 Km^2) (BPS Kabupaten Mesuji, 2016).

Kabupaten Mesuji merupakan daerah agraris yang hal ini berarti bahwa mata pencaharian pokok masyarakat adalah berada pada sektor pertanian. Pertanian yang ada di antaranya yaitu perkebunan sawit, perkebunan karet, sawah, dan peladangan singkong. Selain mata pencaharian pada bidang pertanian, untuk

wilayah Kecamatan Rawajitu Utara, masyarakat memiliki profesi sebagai petambak. Sedangkan untuk iklim, sama halnya dengan wilayah di Indonesia yang lainnya Mesuji juga memiliki iklim tropis sehingga musim berganti dari penghujan sampai pada kemarau sepanjang tahunnya.

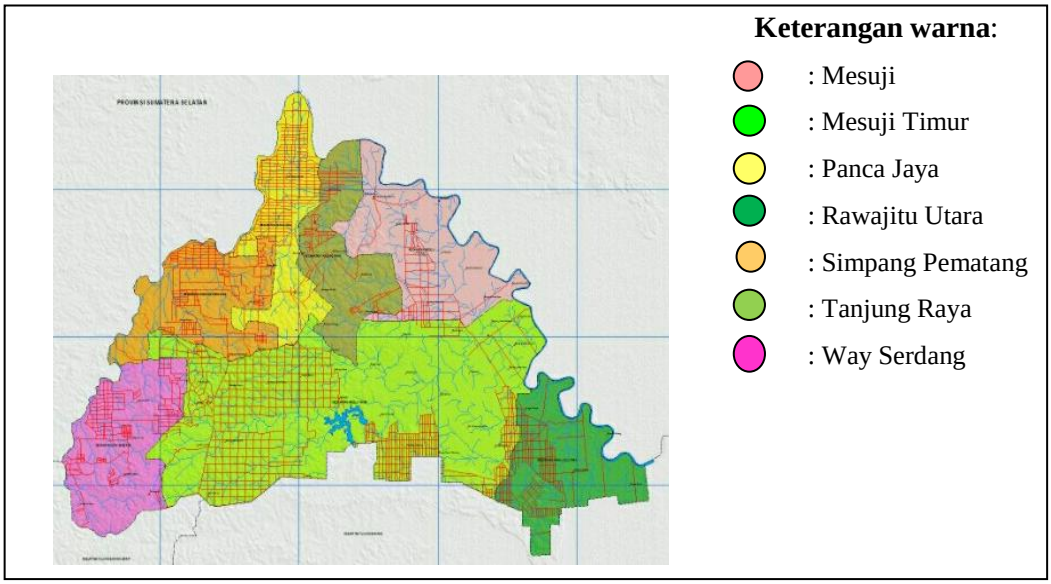

Gambar 1. Peta Kabupaten Mesuji
Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2016

4.2. Kondisi Umum Kecamatan Way Serdang

Way Serdang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji dengan luas wilayah 22.643,03 Ha. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Way Serdang dalam angka 2016, dijelaskan bahwa Kecamatan Way Serdang memiliki dua (2) wilayah ekstransimigrasi yaitu wilayah D dan wilayah E, pada tahun 2008 kedua wilayah ini (D dan E) hanya terdiri dari 13 desa dan kemudian berkembang menjadi 20 desa sampai pada saat ini (Tabel 2). Pemekaran desa terjadi di berbagai kecamatan di Kabupaten Mesuji sebagai

upaya percepatan pembangunan. Selanjutnya, dilihat secara geografis letak Kecamatan Way Sedang berbatasan langsung dengan:

a. Utara : Kecamatan Mesuji Provinsi Sumatera Selatan

b. Selatan: Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji

c. Barat : Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat

d. Timur : Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.

Tabel 2. Daftar Desa di Kecamatan Way Serdang berdasarkan Luas Wilayah

No	Nama Desa	Luas Wilayah (km^2)
1	Buko Poso	16,13
2	Bumi Harapan	6,64
3	Gedung Boga/Raja	20,23
4	Hadi Mulyo	16,90
5	Suka Agung	12,17
6	Rejo Mulyo	10,15
7	Labuhan Baru	11,72
8	Pancawarna	12,55
9	Kebun Dalam	17,78
10	Kejadian	66,44
11	Labuhan Batin	26,59
12	Labuhan Makmur	7,26
13	Gedung Sri Mulyo	15,41
14	Labuhan Permai	13,91
15	Sumber Rejo	6,64
16	Margo Bakti	9,89
17	Labuhan Mulya	7,074
18	Karang Mulya	5,287
19	Tri Tunggal Jaya	8,97
20	Suka Mandiri	9,32
Luas Kecamatan		**241,27**

Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2016.

4.3. Keadaan Umum Desa Labuhan Baru

4.3.1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Labuhan Baru terletak pada 18 Km ke arah barat daya dari kota kecamatan. Berdasarkan buku monografi desa Labuhan Baru tahun 2016, diketahui bahwa Desa Labuhan Baru terbentuk setelah adanya masyarakat transmigran yang mendatangi wilayah desa. Transmigrasi lokal yang di adakan pada tahun 1986 merupakan penduduk yang berasal dari daerah Wonosobo dan Gunung balak (Provinsi Lampung). Desa Labuhan Baru resmi berdiri pada pertengahan Maret 1986 dan pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yaitu bapak Supakir (1986-1989). Seiring perkembangannya, tahun 2008 Desa Labuhan Baru mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Labuhan Baru, Labuhan Mulya, dan Labuhan Makmur.

Sedangkan untuk luas wilayah, saat ini Desa Labuhan Baru memiliki luas wilayah 2.600 Ha. Pembagian wilayah desa yaitu 1.300 Ha merupakan wilayah permukiman, 870 Ha wilayah peladangan dan perkebunan yaitu kelapa sawit dan karet, dan 430 Ha merupakan wilayah lainnya (tanah milik desa) yang digunakan untuk pembangunan tempat umum. Terkait geografis desa, Desa Labuhan Baru memiliki batasan wilayah yaitu pada sebelah:

a. Utara : Desa Labuhan Batin
b. Selatan : Desa Labuhan Makmur
c. Timur : Desa Labuhan Mulya
d. Barat : Desa Labuhan Jaya

4.3.2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Labuhan Baru pada tahun 2016 yaitu 1.475 jiwa yang terdiri dari laki-laki 893 jiwa, perempuan 852 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 104,69% (Tabel 3). Sedangkan sebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Desa Labuhan Baru

Keterangan	Jumlah	Satuan
Keseluruhan penduduk	1.745	Jiwa
Penduduk laki-laki	893	Jiwa
Penduduk perempuan	852	Jiwa
Sex ratio	**104,69**	**Jiwa (persen)**

Sumber: Monografi Desa Labuhan Baru, 2016

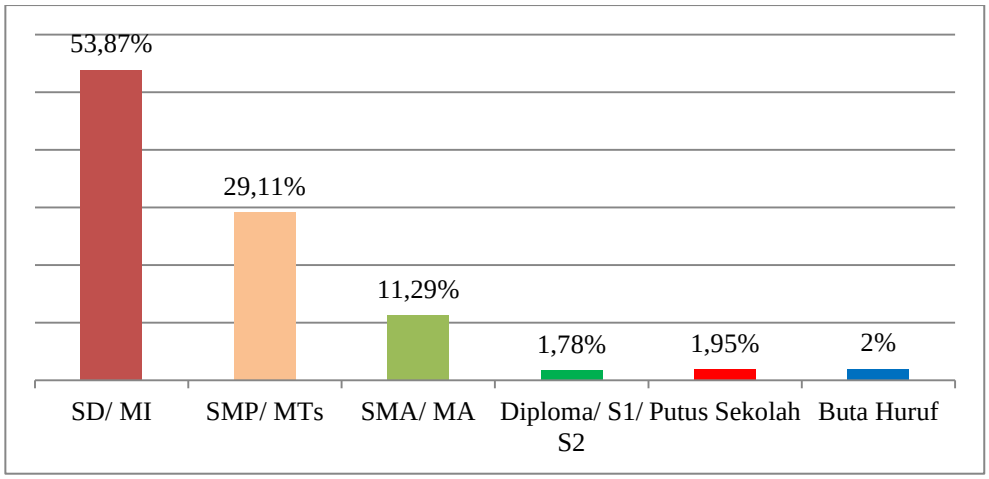

Gambar 2. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat pendidikan
Sumber: Monografi Desa Labuhan Baru, 2016.

Berdasarkan Gambar 2 yang telah disajikan di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Labuhan Baru sebesar 53,87% (940 orang) hanya tamat SD/ MI. Sedangkan untuk penduduk dengan Pendidikan tinggi hanya sebesar 1,78% (31 orang). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tingkat

pendidikan penduduk desa masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Desa Labuhan Baru ini disebabkan karena kurangnya akses masyarakat kepada lembaga pendidikan dan keterbatasan biaya sehingga tidak memungkinkan bagi mereka mempunyai pendidikan yang layak (Monografi Desa Labuhan Baru, 2016).

Lebih lanjut berdasarkan data monografi Desa Labuhan Baru (2016) dapat diketahui lebih lanjut jenis profesi yang dijalani oleh penduduk desa. Pada Gambar 3 dapat diketahui bahwa penduduk Desa Labuhan Baru memiliki beragam profesi diantaranya yaitu: petani, pedagang, guru, karyawan swasta, bidan/ perawat, PNS/TNI/POLRI, dan profesi lainnya (buruh lepas, bengkel, peternak, dll).

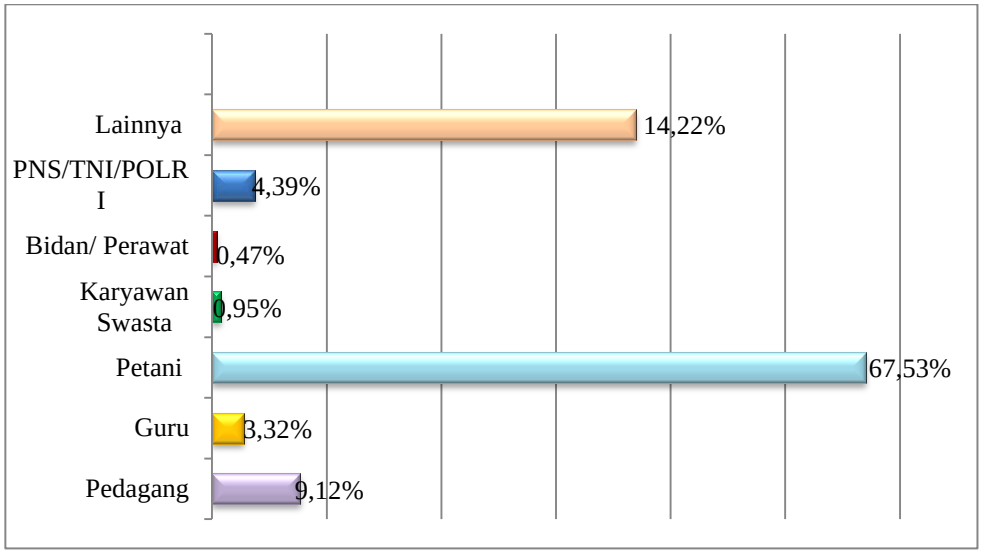

Gambar 3. Profesi Penduduk Desa Labuhan Baru
Sumber: Monografi Desa Labuhan Baru, 2016.

Penduduk pada kelompok usia produktif sebesar 67,53% (570 orang) yang bekerja dibidang pertanian. Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pedagang sebesar 9,12% (77 orang) dan hanya sebesar 0,47% yang bekerja sebagai perawat/ bidan (4 orang) di Desa Labuhan Baru.

4.3.3. Sarana dan Prasarana Desa

Sebagai salah satu desa yang berada jauh dari perkotaan, Desa Labuhan Baru sudah memiliki sarana dan prasaran yang cukup memadai untuk mencukupi kebutuhan dan kepentingan penduduk desa. Berdasarkan pada tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa program terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Mesuji yaitu memberikan sarana wifi sebagai salah satu kebutuhan mendasar saat ini. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Sarana dan Prasaran Desa Labuhan Baru

Sarana dan prasarana	Jenis	Keterangan
Lembaga pendidikan	a. TK/ PAUD	1 unit
	b. SD/ MI	1 unit
	c. SMP/ MTs	1 unit
	d. Pondok pesantren	1 unit
Peribadatan	a. Musholla	10 unit
	b. Masjid	2 unit
Air bersih	a. Sumur gali	296 unit
	b. Sumur bor	8 unit
Kesehatan	a. Puskesdes	1 unit
	b. Posyandu	1 unit
Olahraga	a. Lapangan sepak bola	1 unit
	b. Lapangan bola volly	2 unit
Media Komunikasi dan Koneksi internet	a. Wifi	1 unit
	b. Tower jaringan	2 unit
	c. Televisi	798 unit
	d. Parabola	753 unit
	e. Handphone	1400 unit

Sumber: Monografi Desa Labuhan Baru, 2016

4.3.4. Kelembagaan Desa

4.3.4.1. Pembagian Wilayah Desa

Berdasarkan pada data monografi desa 2016, diperoleh data bahwasanya Desa Labuhan Baru memiliki menjadi lima (5) dusun, diantaranya yaitu dusun margo sari, dusun margo utomo, dusun margo rejo, dusun margo mulyo, dan dusun margo makmur. Dusun tersebut masing-masing terdiri dari 2 RT (Rukun tetangga). Pembagian desa menjadi beberapa dusun merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mempermudah pengawasan serta memantau perkembangan desa.

4.3.4.2. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat yang ada di desa labuhan baru dapat dikatakan masih belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat dan ketertarikan masyarakat untuk membangun kelembagaan yang ada masih rendah. Sejumlah kelembagaan masyarakat yang ada saat ini hanya tampak sebagai suatu wadah yang tidak diminati. Keadaan ini dapat dilihat dari sajikan Tabel 5, keadaan dimana lembaga minim anggota serta kurangnya partisipasi masyarakat desa.

Tabel 5. Kelembagaan Desa Labuhan Baru

Kelembagaan	Anggota
PKK	13 orang
Karang taruna	12 orang
KUD	40 orang

Sumber: Monografi Desa Labuhan Baru, 2016

4.4. Penerapan Dana Desa di Provinsi Lampung

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (2015) Persyaratan pencairan dana desa yang harus dilengkapi desa yaitu harus menetapkan APBDes, RPJMDes, dan RKPDes. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka pencairan dana desa dapat ditangguhkan.

Lebih lanjut, untuk pencairan dana desa anggaran tahun 2015 dibagi menjadi tiga (3) tahap pencairan. Pencairan pertama dilakukan pada April minggu ke-2 sebesar 40%, tahap kedua pada Agustus minggu ke-2 sebesar 40%, dan tahap ketiga pada Oktober minggu ke-2 sebesar 20%. Sedangkan untuk penerima dana desa anggaran tahun 2015 yang terdaftar yaitu sebanyak 434 kabupaten/kota (74.093 desa) dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp.643,8 triliun (Kurniati, 2015).

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penerima Dana Desa untuk anggaran tahun 2015. Daerah kabupaten di Lampung yang menerima dana desa tersebut di antaranya adalah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan,

Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, di Kabupaten Mesuji desa yang menerima dana desa untuk tahun anggaran 2015 sebanyak 103 desa definitif. Desa Labuhan Baru merupakan salah satu desa yang menjadi penerima dana desa di Kabupaten Mesuji. Syarat yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten kepada desa sebelum menerima dana desa yaitu telah membuat RPJMDes, tidak memiliki permasalahan terkait pajak daerah, serta desa tersebut berdiri secara resmi dan diakui oleh pemerintah daerah.

4.5. Implementasi Dana Desa Anggaran 2015 di Desa Labuhan Baru

Pada tahun 2015, dana desa di Desa Labuhan Baru diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Sebelum rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut, berdasarkan ketentuan bersama hasil musyawarah, dana desa nantinya akan masuk ke dalam APBDes. APBDes inilah yang kemudian akan dikelola oleh aparatur desa guna mendanai pembangunan desa. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, Dana Desa anggaran tahun 2015 di Desa Labuhan Baru dipergunakan untuk pembangunan gapura selamat datang, pembangunan drainase, jembatan, dan bantuan untuk pembangunan pondok pesantren.

Permasalahan yang dialami oleh desa terkait penggunaan dana desa adalah kenyataan bahwa untuk tahun 2015 besaran dana desa yang cair masih jauh dari kata cukup. Hal ini menyebabkan pembangunan akhirnya terhenti dan berjalan tidak sesuai dengan RPJMDes yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahun 2015, rencana pembangunan yang terealisasi yaitu pembangunan tiga gapura selamat datang, satu jembatan besar, drainase sepanjang ±986 meter, dan bantuan pembangunan pondok pesantren. Hasil dari penggunaan dana desa anggaran tahun 2015 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. Jembatan Wujud Realisasi Dana Desa 2015
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2017

Gambar 5. Gapura Selamat Datang Wujud Realisasi Dana Desa 2015
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2017

Gambar 6. Drainase Wujud Realisasi Dana Desa 2015
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2017

Gambar 7. Bantuan untuk Pembangunan Pondok Pesantren dari Dana Desa 2015
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2017

4.6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016-2021 Desa Labuhan Baru

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Labuhan Baru disusun guna memberikan acuan dan pedoman pembangunan yang berguna selama enam tahun. Selain hal tersebut, RPJM desa juga berguna untuk

memberikan arahan seluruh kegiatan yang akan berjalan di desa. Hal ini berarti juga RPJM dapat memberikan kontrol terhadap pengeluaran desa, sehingga dapat meminimalisisr disalokasi anggaran.

Penyajian subbab terkait RPJM di sini bertujuan sebagai salah satu bukti terkait pembangunan dan rencana pembangunan yang ada di Desa Labuhan Baru. Penyajian subbab ini dilakukan karena setelah peneliti melakukan penelitian dan menelusuri bukti terkait data evaluasi dana desa, namun pihak aparatur desa tidak memberikan izin akses. Sehingga hanya dapat menyajikan RPJM terkait rencana pembangunan.

Berdasarkan data RPJM yang telah diperoleh, rencana pembangunan jangka menengah di Desa Labuhan Baru untuk jangka tahun 2016-2021 memiliki anggaran dana kurang lebih 16.046.013.800. Dana tersebut akan dan digunakan untuk empat bidang/jenis kegiatan. Keempat bidang tersebut yakni penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 17,9%, pembangunan desa sebesar 71,8%, pembinaan masyarakat sebesar 6,6%, serta digunakan untuk pemberdayaan masyarakat 3,7%.

Merujuk dari persentase yang telah disajikan di atas dapat diketahui bahwa persentase tertinggi yakni pada bidang pembangunan sebesar 71.8%. Hal ini dikarenakan di Desa Labuhan Baru khususnya, dan umumnya untuk wilayah Kabupaten Mesuji masih menggalakkan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur. Sehingga sebesar 71,8% dari dana yang dianggarkan, digunakan untuk pembangunan termasuk di dalamnya yakni pembangunan jalan.

Gambaran terkait pembangunan untuk tahun 2016 di Desa Labuhan Baru meliputi lima dusun. Rincian pembangunan yang direncanakan untuk tahun anggaran 2016 yakni meliputi pembangunan pengerasan jalan, pembangunan gorong-gorong, drainase, pengadaan generator set (Genset), dan pelebaran jalan. Guna mengetahui efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan, terutama pembangunan jalan untuk tahun 2016 diperlukan informasi mengenai data evaluasi dana desa. Namun demikian, setelah diupayakan untuk menelusuri data evaluasi dana desa, peneliti menemui kendala yakni tidak diberikannya data evaluasi tersebut oleh pihak Desa Labuhan Baru.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat menyajikan informasi terkait data evaluasi dana desa anggaran 2016. Sehingga menjadi sulit untuk menentukan kategori efektivitas (sangat efektif, efektif, cukup efektif, tidak efektif, dan sangat tidak efektif) dari pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Labuhan Baru, untuk tahun anggaran 2016. Pada akhinya, pengkategorian efektivitas untuk pengelolaan dana desa dinilai berdasarkan penilaian dari masyarakat Desa Labuhan Baru.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Hasil distribusi frekuensi terkait efektivitas, yakni untuk penilaian masyarakat perihal efektivitas pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Labuhan Baru diperoleh hasil yaitu "cukup efektif" dengan nilai 99,5%. Adapun untuk kategori masing-masing subvariabel, apabila merujuk pada analisis data yang telah dilakukan, keenam subvariabel tersebut berada pada kategori cukup efektif. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kategori penilaian masyarakat perihal efektivitas pengelolaan dana desa secara umum berada pada kategori cukup efektif.
2. Selanjutnya untuk uji analisis faktor, dari 28 indikator hanya 27 indikator yang valid sehingga uji analisis faktor dilakukan dengan 27 indikator tersebut. Berdasarkan hasil analisis faktor, diperoleh enam faktor yang mewakili 27 indikator penelitian. Keenam faktor tersebut yaitu akuntabel, disiplin dan tertib anggaran, transparansi, evaluasi, perencanaan, dan

partisipasi. Secara keseluruhan, dari keenam faktor terbentuk, faktor yang memiliki kontribusi (persentase) tertinggi untuk penilaian masyakarat tentang pengelolaan dana desa pada pelaksanaan pembangunan jalan adalah faktor akuntabel. Faktor akuntabel ini memiliki nilai *eigen values* sebesar 9,035 atau sebesar 33,46%.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, masyarakat menilai bahwasanya pengelolaan dan desa di Desa Labuhan Baru sudah cuku efektif. Hal ini berarti masyarakat menganggap bahwa aparatur desa telah mampu mengelola dana desa. Namun demikian, diharapkan kepada desa khususnya Desa Labuhan Baru seharusnya membentuk tim pengelola untuk perencanaan dan implementasi dana desa. Hal ini karena telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Kepada masyarakat desa Khususnya di Desa Labuhan Baru, diharapkan dapat tetap objektif, dan terlibat dalam pembangunan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga hal ini akan semakin mengoptimalkan implementasi dari dana desa yang diterapkan.
3. Peneliti menyadari bahwasanya dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki kembali. Pada

penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada persepsi atau penilaian masyarakat untuk menilai efektivitas pengelolaan dana desa. selain itu juga, peneliti tidak dapat menyertakan data evaluasi pembangunan terkait dana desa. Sehingga sumber informasi untuk menilai efektivitas sepenuhnya pada penilaian masyarakat. Oleh karena itu, bagi peneliti yang lain diharapkan dapat lebih menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M.Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kejikana Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 6 No.1, 61-76*

Ardila, Novi. (2015). Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Mensanak Kecamatan Senayan Kabupaten Lingga. J*urnal Naskah Publik, 1-14.* http://jurnal.umrah.ac.id/wpontent/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a 96d0947c6478e525e/2015/09/JURNAL-NOVI.pdf. Di akses pada 29 September 2016.

Aziz, N.L. (2017). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik, 193-211*. http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/575/480 di akses pada 18 april 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji. (2016). *Mesuji dalam Angka 2016*. Mesuji; BPS Kabupaten Mesuji

Darmi, Titi. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial pada Sektor Pemerintahan Desa (study pada pengelolaan dana desa). J*urnal Antropologi,21-27*. http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/articel/view/48/pdf_16 Di akses pada 13 Desember 2016

Effendi,M. (2015). Analisis Faktor. *Statistik Industru II, 1-31*. http://masud.lecture.ub.ac.id/files/2015/05/10.-Analisis-Faktor-MEF.pdf Di akses 18 Desember 2016.

Gudhono. 2016. *Analasis Data Multivariat*. Yogyakarta: BPFE

Ho, Robert. 2006. *Handbook of Univariate and Multivariate Data Analysis and Interpretation with SPSS*. Australia. Taylor & Francis Group, LLC.

Hudayana, Bambang., & FPPM, Tim. (2005). *Peluang Pengembangan Pertisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa.* http://ejournal.narotama.ac.id/files/Peluang%20Pengembangan%20Partisipasi%20Masyarakat%20melalui%20ADD.pdf. Di akses 27 September 2016.

Jurnaidi., Djumadi., & Paranoan, DB. (2015). Faktor -Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Administrative Reform* , 112-124. http://ar.mian.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/03/01_format artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20(03-04-15-04-46-30).pdf. Di akses 04 September 2016.

Lee, M. (1990). *Policy And Rule Configuration: Korean Rural Develoment Movement Saemaul Undong.* Bloomington, Indiana: Indiana University.

Listiyani, R., & Pambudi, A. (2016). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. *Jurnal Adinegara, 1-12*. http://jurnal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/articel/download/2505/2150 Di akses pada 13 Desember 2016

Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN (UPP STIM YKPN)

Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika aditama

Manopo, D.C. (2015). Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Ilmu Sosial*, 1-10. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/7849/7413 Di akses 27 September 2016.

Nafidah, L.N., & Suryaningtyas, M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Bisnis*, 214-239.

http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1480/1351Di akses 10 September 2016.

Pasaribu, Rowland, B.F.(2012). *Bahan Ajar Ekonomi Pembangunan*.Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Depok. http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.2. Di akses 2 Oktober 2016

Prasetyo, Bambang., & Jannah, Lina M.(2012). *Metode penelitian kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Raja Grafindo Persada.

Putra, C.K., Pratiwi, R.N., & Suwondo. (2014). Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* , 1203-1212.

Renyowijoyo, Muindro. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Nonlaba*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Santoso, Singgih. (2014). *Statistik Multivariat*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Saputra, I.W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* , 1-10. http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/6597/4498.

Sarwono, Jonathan. (2006). *Analisis Data Penelitian menggunakan SPSS*. Yogyakarta: ANDI

Sedarmayanti. (2009). *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju

Steers, M. Richard. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Supranto, J. 2000. *Statistik Teori Dan Aplikasi Edisi Enam Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

Tampubolon, Richardo. J. (2014). Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan (JJIP), 1-20.*

Taufik, T. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Strategi Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi* , 1-13.

Ujianto., & Abdurachman. (2004). Analaisis Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Minat Beli Konsumen Sarung. *Jurnal Ekonomi, 34-54* http://puslit2.petra.ac.id/gudangpaper/files/1936.pdf di akses pada 18 april 2017

Widhiarso, Wahyu. (2009). Prosedur analisis faktor menggunakan program komputer. *Handout Mata Kuliah Psikometri, 1-4*. http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/prosedur_analisis_faktor_dengan_menggunakan_komputer.pdf Di akses 18 Desember 2016.

Wijaya, N. M. (2013). Contemporary Problemsin Japan's Rural Areas And Opportunities For Developing Rural Tourism: A Case Of Yamashiro Districtin Yamaghuci Prefecture. *Journal of East Asian Studies* , 59-72. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/132202/2/2001-2-7.pdf. Di akses 09 september 2016.

Zakaria, R, Yando. (2013). Menimbang Mandat Konstitusi Tentang Kedudukan Desa atau Disebut dengan Nama Lain. *Jurnal IRE mandatory*, 1-30. https://www.ireyogya.org/uploads/Jurnal%20mandatory%2010%20edisi%2001.pdf. Di akses pada 09 september 2016.

Sumber Lainnya

BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. 1-55

Gunawan, M.A. Analisis Faktor Untuk Butir Non Tes dengan SPSS. *Slideshow*, 1-8. http://www.linked.id Di akses pada 28 maret 2017.

Kemendesa. (2016). *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat-Desa. http://www.djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/03/03.-Penggunaan-Dana-Desa_Kemendes.pdf. Di akses pada 07 September 2016.

KPK. (2015). *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.* Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kpk. https://www.scribd.com/doc/298524880/Slide-Laporan-Kajian-Sistem-Pengelolaan-Keuangan-Desa-KPK. Di akses pada 07 September 2016.

Keuangan Desa. (2015). Asas dan Pembagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Penabulu Alliance , 1-8*. http://www.keuangandesa.com/wp-content/uploads/2015/04/01.-Asas-Kekuasaan.pdf Di akses 01 Oktober 2016

Kurniati, Iin. (2015). Menata Dana Desa. *Media Keuangan volume X/no.93/Juni 2015. 18-20*. http://www.linked.id Di akses pada 20 maret 2017

Monografi Desa Labuhan Baru. (2016). *Profil Desa Labuhan Baru 2016*.

PMK. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.49/PMK. 07/2016*. http://www.keuangandesa.com/wp-content/uploads/2016/04/PMK-49-Dandes-1-Tata-cara-Pengalokasian-penyaluran-penggunaan-pemantauan dan-evaluasi-Dana-Desa.pdf. Di akses 29 September 2016.

Hayu, Pradani. (2015). Dana Desa yang Adil dan Merata. *Media Keuangan volume X/no.93/Juni 2015. 23-25*. http://www.linked.id Di akses pada 20 maret 2017